

Lalakin

BIRO KEUANGAN



Laporan Kinerja

2025



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Biro Keuangan untuk menyelenggarakan fungsi Administrasi Keuangan, Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi. Dalam laporan ini, kami memaparkan berbagai macam capaian kinerja, kendala dan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program kerja Biro Keuangan tidak terlepas dari kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh unit kerja di lingkungan BPS, serta dukungan dari para pemangku kepentingan. Untuk itu, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Keuangan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan dan peningkatan kualitas kinerja Biro Keuangan di masa mendatang.

Jakarta, 19 Januari 2026

BADAN PUSAT STATISTIK

Kepala Biro Keuangan,


Darusman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I - PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	12
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	13
1.4. Potensi dan Permasalahan	17
1.5. Sistematika Penyajian	19
BAB II - PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Visi dan Misi Badan Pusat Statistik	21
2.2. Target Kinerja Biro Keuangan	21
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
2.4. Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	26
2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	33
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	35

3.1. Realisasi, Capaian Kinerja dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Biro Keuangan Tahun 2025	36
3.2. Capaian Kinerja Biro Keuangan Terhadap Target Renstra	46
3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	47
3.4. Prestasi dan Inovasi Biro Keuangan	49
3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025	51
BAB IV - PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	23
Tabel 2. Target Kinerja Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	25
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2025.....	25
Tabel 4. Alokasi Pagu Anggaran Biro Keuangan Tahun 2025	34
Tabel 5. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Biro Keuangan per Sasaran selama Tahun 2023-2025	38
Tabel 6. Rata-Rata Capaian Kinerja 2025.....	39
Tabel 7. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	40
Tabel 8. Capaian Kinerja Persentase Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	44
Tabel 9. Capaian Kinerja Biro Keuangan terhadap Target Renstra.....	47
Tabel 10. Monitoring Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis	48
Tabel 11. Target, Realisasi Target, Capaian Terhadap Target, Pagu dan Realisasi Anggaran, Efisiensi Biro Keuangan menurut Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	52
Tabel 12. Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Sasaran Tahun 2025.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan.....	13
Gambar 2. Pegawai Biro Keuangan	14
Gambar 3. Jumlah Pegawai Biro Keuangan Berdasarkan Kualifikasi Jabatan.....	15
Gambar 4. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	16
Gambar 5. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan Golongan Kepangkatan	16
Gambar 6. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023-2025.....	36
Gambar 7. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Keuangan terhadap Rata-Rata Eselon II di Sekretariat Utama	37

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Perjanjian Kinerja.....	60
LAMPIRAN 2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	62
LAMPIRAN 3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025.....	63
LAMPIRAN 4 Jumlah Pejabat Fungsional Biro Keuangan Tahun 2025.....	64
LAMPIRAN 5 Daftar Prestasi/Penghargaan Biro Keuangan Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025.....	65
LAMPIRAN 6 Daftar Inovasi Unit Kerja Menurut Biro Keuangan Tahun 2025.....	68
LAMPIRAN 7 Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Unit Kerja TA 2025.....	72
LAMPIRAN 8 Dokumentasi Kegiatan.....	73

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Biro Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2025 adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah ringkasan LAKIN Biro Keuangan Tahun 2025.

- Sasaran Biro Keuangan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari salah satu sasaran strategis Sekretariat Utama BPS yaitu “Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran” . Pencapaian sasaran program diukur berdasarkan beberapa indikator kinerja utama yang salah satunya menjadi tanggung jawab Biro Keuangan BPS yaitu Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Indikator Persentase Laporan Keuangan BPS yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mempunyai 2 (dua) indikator proksi untuk menghitung capaian kinerja setiap triwulan yaitu nilai kualitas pelaksanaan anggaran dan nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- Secara umum Biro Keuangan telah dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran dimaksud dengan nilai pencapaian kinerja rata-rata sangat baik dengan persentase rata-rata capaian penyelesaian kegiatan mencapai 103,48 persen.
- Pada aspek keuangan, pencapaian penyerapan anggaran Biro Keuangan sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 melalui kegiatan 2884 Pengelolaan dan

Pengembangan Administrasi Keuangan mencapai Rp 282.013.778.690 atau 79,14 persen dari alokasi total pagu anggaran Unit Kerja Biro Keuangan sebesar Rp. 356.331.705.000.

- Kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian target kinerja secara umum meliputi:
 1. Adanya kekurangan dan keterlambatan penyampaian dokumen pembayaran
 2. Ketidaksesuaian antara permintaan dan realisasi nilai Tambahan Uang Persediaan
 3. Adanya peningkatan kegiatan di Triwulan IV akibat dari dibukanya pagu anggaran yang diblokir
 4. Adanya selisih dalam proses rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Akuntansi Pusat (SiAP)
 5. Proses penyelesaian tuntutan ganti rugi yang terhambat karena debitur yang tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan

Walaupun Laporan Keuangan yang disusun oleh Biro Keuangan sejak tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi masih terdapat temuan-temuan yang harus dibenahi oleh Biro Keuangan. Jika hal ini dapat diselesaikan maka kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan akan semakin lebih baik.

Semoga pelaksanaan program dan kegiatan Biro Keuangan Tahun 2025 dapat memberikan kontribusi nyata di lingkungan Badan Pusat Statistik, terutama dalam upaya kualitas pengelolaan keuangan BPS yang lebih baik dan dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas Audit Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik.

BAB

I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Biro Keuangan
- Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran
- Potensi dan Permasalahan
- Sistematika Penyajian Laporan

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS), dalam mengemban tugasnya dalam menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, tentunya harus didukung dengan pengelolaan administrasi keuangan yang efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Biro Keuangan merupakan unit kerja eselon II BPS yang berada di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi. Fungsi Biro Keuangan BPS dijalankan melalui satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen (Dukman) kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan. Dalam kegiatan ini, untuk tahun 2025 terdapat 5 (lima) Rincian Output yaitu Layanan Gaji dan Tunjangan, Layanan Administrasi Keuangan, Dokumen Perbendaharaan Pelaksanaan, Dokumen Perbendaharaan Evaluasi dan Laporan Keuangan.

Untuk mengukur keberhasilan Biro Keuangan dalam pencapaian kegiatan tahun 2025, maka pada awal tahun telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2025. Target tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Keuangan 2025.

Laporan Kinerja Biro Keuangan 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja unit kerja instansi pemerintah. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Biro Keuangan BPS tahun 2025-2029,

sehingga diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan acuan untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Biro Keuangan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan diperbaharui dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

Tugas

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan Administrasi Keuangan;
- 2) Pelaksanaan Perbendaharaan;
- 3) Pelaksanaan Verifikasi; dan
- 4) Pelaksanaan Akuntansi.

Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Biro Keuangan, berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik tanggal 17 Desember 2020, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Biro Keuangan secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

1.3.1 Sumber Daya Manusia

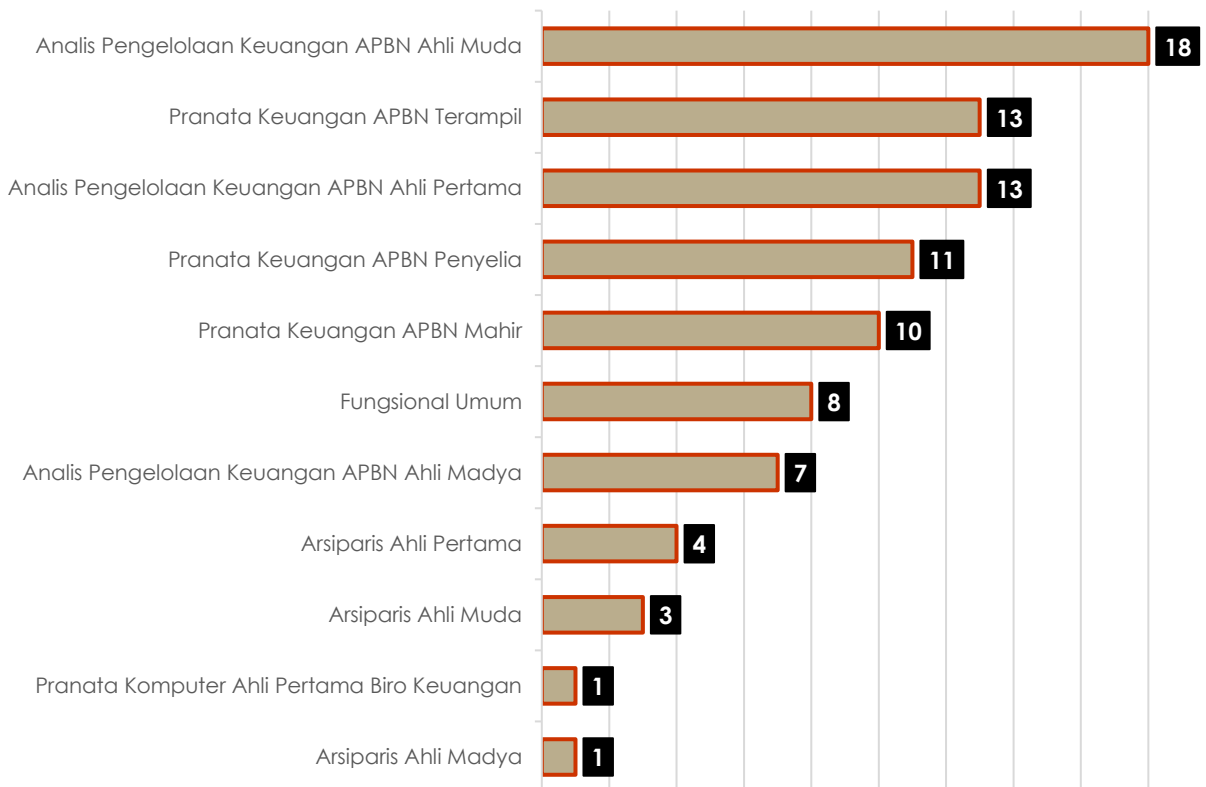
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, diperlukan sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten untuk menentukan keberhasilan organisasi pemerintah. Sumber Daya Manusia berkontribusi signifikan dalam memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi dengan efisien dan responsif terhadap dinamika lingkungan kerja. Pada 31 Desember 2025 Biro Keuangan memiliki jumlah pegawai sebanyak 90 (sembilan puluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang

Kepala Biro, 81 (delapan puluh satu) orang dengan jabatan fungsional tertentu, dan 8 (delapan) orang dengan jabatan fungsional umum.



Gambar 2. Pegawai Biro Keuangan

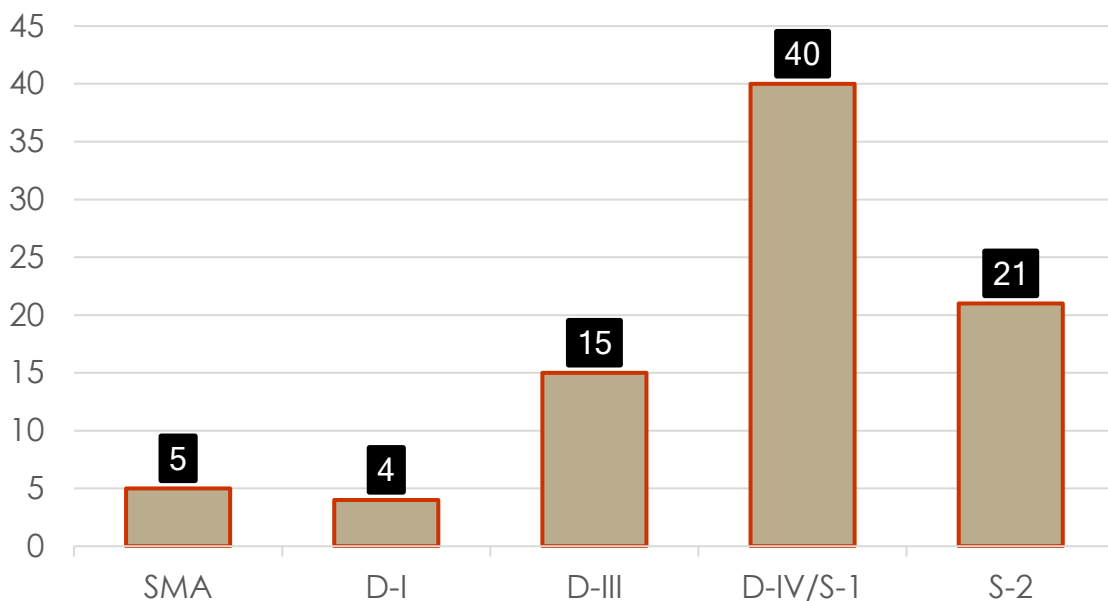
Jabatan Fungsional yang ada di Biro Keuangan terdiri dari Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN (Terampil, Mahir, Penyelia); Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya); Arsiparis (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya); Pranata Komputer Ahli Pertama; dan Fungsional Umum. Komposisi jumlah pegawai pada menurut jabatannya dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 3. Jumlah Pegawai Biro Keuangan Berdasarkan Kualifikasi Jabatan

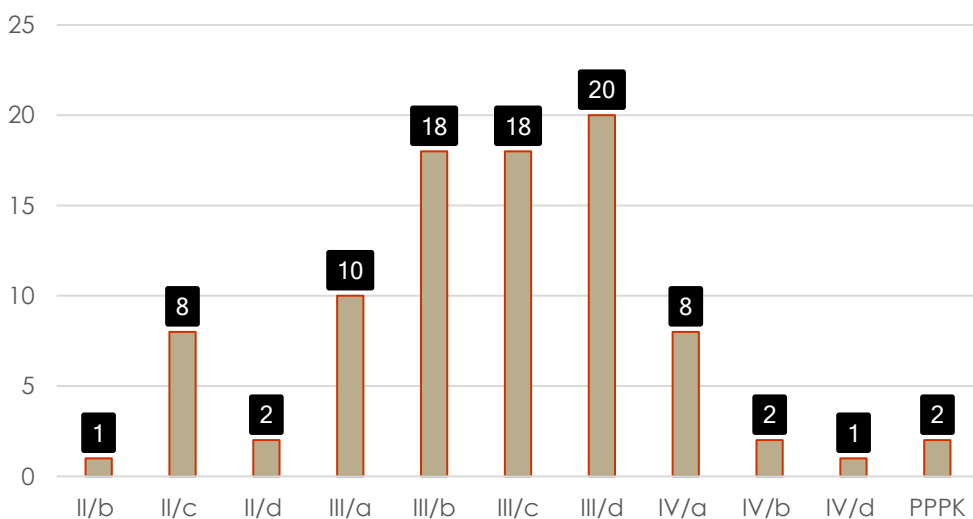
Berdasarkan diagram di atas, jabatan dengan jumlah pegawai terbanyak adalah jabatan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda dengan jumlah 18 orang atau 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah pegawai.

Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3, dari 90 orang pegawai di Biro Keuangan tercatat sebanyak 23 pegawai (25,56 %) berpendidikan S-2, 45 pegawai (50,00 %) berpendidikan D-IV/S-1, 17 pegawai (18,89 %) berpendidikan D-III, 1 pegawai (1,11 %) berpendidikan D-I, dan 4 pegawai (4,44 %) berpendidikan SMA.



Gambar 4. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Klasifikasi pegawai berdasarkan golongan kepangkatan didominasi oleh golongan III sebesar 66 orang (77,65 %) dari jumlah pegawai sebesar 90 orang. Kemudian untuk golongan II terdapat 11 orang (12,22 %); golongan IV terdapat 11 orang (12,22 %) dan 2 orang (2,22 %) PPPK, dengan rincian seperti pada tabel berikut:



Gambar 5. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan Golongan Kepangkatan

1.3.2 Dukungan Anggaran

Selain SDM, salah satu faktor yang dapat memperlancar kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi adalah sumber daya berupa dukungan anggaran. Sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA054.01-0/2025, Biro Keuangan menerima pagu anggaran sebesar Rp 388.575.364 pada awal tahun 2025. BPS melakukan revisi DIPA sehingga pagu anggaran yang dikelola Biro Keuangan menjadi Rp356.331.705.000 atau turun sekitar 15 milyar dari pagu awal.

1.4. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan Permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.4.1 Potensi

1. Biro Keuangan didukung oleh sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan keuangan. Biro Keuangan didukung oleh 24 orang pegawai memiliki sertifikat PPK, 53 orang memiliki sertifikat Bendahara, 16 orang memiliki sertifikat PPSPM dan 26 orang memiliki sertifikat PBJ untuk mendukung pekerjaan.
2. Biro Keuangan memiliki potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan merata.
3. Biro Keuangan memiliki potensi sumber daya manusia dengan komposisi usia muda yang memiliki etos kerja yang adaptif, inovatif dan kreatif dalam mendukung penyelesaian pekerjaan.

4. Kedudukan Biro Keuangan secara kelembagaan memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan.
5. Biro Keuangan telah memanfaatkan teknologi informasi secara mandiri untuk meningkatkan layanan secara digital seperti E-Calk, E-PIPK, SIMOKA, dan SEKAR.
6. Komunikasi dan koordinasi seluruh pegawai telah terjalin dengan baik melalui berbagai kegiatan seperti *Sharing Knowledge*, pekan olahraga, dan pemilihan *Employee of The Month* dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi.

1.4.2 Permasalahan

1. Adanya perubahan aturan dan kebijakan bidang keuangan dari Kementerian Keuangan yang memerlukan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penerapannya di lingkungan Badan Pusat Statistik.
2. Formasi yang tersedia tidak sesuai dengan *existing* jenjang jabatan yang akan diduduki oleh pegawai.
3. Terjadinya penumpukan kegiatan di triwulan IV yang mengakibatkan efektivitas pengelolaan Keuangan membutuhkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi.
4. Adanya perbedaan pemahaman dalam pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan laporan Keuangan.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan Tahun 2025 disusun berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan; sistematika penyajian laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi tentang visi dan misi BPS; target kinerja; perjanjian kinerja; dukungan BPS terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; dan rencana kerja dan anggaran.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi tentang realisasi, capaian kinerja, dan nilai penilaian kinerja organisasi Tahun 2025; capaian kinerja Biro Keuangan terhadap target renstra; capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; Prestasi dan Inovasi serta realisasi dan efisiensi Anggaran.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja yang dilakukan oleh unit kerja.

BAB

III

PERENCANAAN KINERJA

- Visi dan misi BPS
- Target Kinerja Biro Keuangan 2025-2029
- Perjanjian Kinerja Biro Keuangan 2025-2029
- Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik

Visi BPS yaitu “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” .

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS. Selaras dengan arah kebijakan di dalam RPJPM 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
3. Menguatkan Kapasitas Kelembagaan Statistik yang Efektif dan Efisien

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro Keuangan bahwa sampai dengan laporan kinerja ini disusun visi, misi dan tujuan di level unit kerja/satuan kerja belum bisa ditetapkan.

2.2 Target Kinerja Biro Keuangan

Indikator Kinerja merupakan ukuran yang akan memberikan informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 Biro Keuangan memiliki Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang terdiri dari:

1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah alat ukur yang digunakan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Keuangan, untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pemerintah (satker). IKPA bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran negara dilaksanakan secara efisien, efektif, tertib, dan sesuai aturan.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga ada 3 (tiga) aspek pengukuran nilai IKPA yaitu aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dari 3 (tiga) aspek pengukuran tersebut, Biro Keuangan mengampu 2 (dua) aspek yaitu aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dasar hitung Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah berdasarkan komponen yang ada, yakni:

- a) Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran (25%)
 - Revisi DIPA (10%)
 - Deviasi Halaman III DIPA (15%)
- b) Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran (50%)
 - Penyerapan Anggaran (20%)

- Belanja Kontraktual (10%)
 - Penyelesaian Tagihan (10%)
 - Pengelolaan UP/TUP (10%)
 - Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)
- c) Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
- Capaian Output (25%)

Tabel 1. Target Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50

2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Presentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi Keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan pemerintah.

Berikut adalah kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah:

1. Kesesuaian format laporan
2. Ketersediaan dokumen pendukung
3. Kesesuaian pengakuan pendapatan dan belanja
4. Ketersediaan informasi keuangan
5. Kesesuaian dengan standar akuntansi.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung dengan menggunakan dasar hitung

$$\text{Formula} = \frac{n}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

n = Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

N = Jumlah Laporan Keuangan yang Dihasilkan

Laporan Keuangan yang dimaksud diatas adalah Laporan Keuangan tingkat Instansi. Laporan Keuangan yang Dihasilkan dalam satu tahun anggaran meliputi laporan Keuangan *Unaudited*, laporan Keuangan *Audited*, Laporan Keuangan Semester I, dan Laporan Keuangan Triwulan III.

Tabel 2. Target Kinerja Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Biro Keuangan telah menetapkan target yang harus dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan Biro Keuangan dalam memenuhi tugasnya di tahun 2025. Target tersebut dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Keuangan yang merupakan bentuk komitmen Biro Keuangan kepada Sekretaris Utama BPS. Berikut tabel Perjanjian Kinerja Biro Keuangan tahun 2025 untuk masing-masing indikator sasaran.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Poin	94,50
2.	Anggaran	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	100,00

2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) mendukung prioritas nasional melalui penyediaan data statistik berkualitas, akurat, dan tepercaya untuk perencanaan, pemantauan, serta evaluasi pembangunan, khususnya menuju Indonesia Emas 2045. Dukungan ini mencakup digitalisasi data kemiskinan, pemantauan Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan desa, serta integrasi data nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendukung prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dengan menyediakan data akurat untuk kebijakan strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk bansos tepat sasaran, serta pemantauan data di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). BPS juga fokus pada penguatan data ekonomi melalui persiapan Sensus Ekonomi 2026 dan pemantauan inflasi.

Prioritas Nasional

1. Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” , salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

2. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Dalam rangka mendukung sasaran program prioritas berupa terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi, serta sasaran kegiatan prioritas terkait terjaganya komponen inflasi harga bergejolak, Direktorat Statistik Harga Konsumen telah melaksanakan berbagai aktivitas strategis secara menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya tersebut diawali dengan perencanaan anggaran serta penyiapan instrumen pendataan dan metodologi, termasuk penyempurnaan instrumen pengolahan data dan penyiapan petugas, guna memastikan terselenggaranya kegiatan statistik harga yang mampu menghasilkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi dan andil inflasi yang akurat, konsisten dan terpercaya.

Selanjutnya, proses penghitungan IHK, inflasi dan andil inflasi pada tingkat nasional, 38 provinsi, dan 150 kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme harmonisasi dan rekonsiliasi antar level harga untuk menjaga konsistensi,

integritas dan validitas output yang dihasilkan. Di samping itu, penguatan infrastruktur pendukung terus dilakukan melalui penyediaan dan pemanfaatan instrumen pengumpulan data berbasis aplikasi FASIH serta penyempurnaan instrumen diseminasi guna mendukung efektivitas publikasi dan promosi data inflasi. Penjaminan kualitas dilaksanakan secara konsisten melalui evaluasi internal berupa rapat evaluasi dan penerapan Quality Gate serta evaluasi eksternal melalui mekanisme SIQAF sehingga proses dan output statistik yang dihasilkan tetap memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

3. Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi

Kegiatan Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi mendukung Proyek Prioritas Nasional yang terkait dengan Tata Kelola Data serta Pengembangan dan Pemanfaatan Emerging Technology. Penentuan target jumlah dan jenis kegiatan statistik yang memanfaatkan Big Data untuk statistik resmi selama periode 2025–2029 telah dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kapasitas SDM, serta dukungan anggaran yang tersedia.

Pada tahun 2025 aktivitas yang dilakukan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan Mobile Positioning Data (MPD) untuk penghitungan statistik pariwisata seperti: Wisatawan Nusantara (Wisnus), Wisatawan Nasional (Wisnas); statistik mobilitas penduduk seperti Commuter, dan statistik ekonomi-sosial melalui indentifikasi wilayah metropolitan (Metropolitan Statistical Area—MSA).

Prioritas Presiden

1. Inpres 4 2025 : DTSEN
2. Inpres 6 2025 : Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi

Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah, Beras dalam Negeri, serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dilakukan melalui dua kegiatan statistik utama, yaitu Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi. Survei KSA Padi mencakup seluruh lahan pertanian, baik sawah maupun bukan sawah, dilaksanakan di 38 provinsi dan 488 kabupaten/kota, dengan metode pengumpulan data berbasis survei (sampling) menggunakan CAPI. Sebanyak 281.817 titik amatan dipantau setiap bulan oleh 7.572 petugas dengan metode pengamatan langsung di lapangan. Sementara itu, Survei Ubinan Padi dilakukan untuk memperoleh data produktivitas melalui pengukuran langsung pada 78.626 sampel plot ubinan, dilaksanakan setiap empat bulan oleh petugas BPS. Survei ubinan padi menggunakan pendekatan area berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) dengan menggunakan titik pengamatan pada subsegmen KSA sesuai fase pertumbuhan padi. Dengan melibatkan peranan teknologi, terkini, sehingga data produksi padi yang dikumpulkan menjadi lebih akurat, cepat dan tepat waktu. Kedua survei dilengkapi dokumentasi foto kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas.

3. Inpres 8 2025 : Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui aktivitas utama, salah satunya penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala.

4. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi

terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG.

Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Supplier (penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan siswa yang menerima MBG. Survei Baseline dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan bergizi di rumah tangga. Responden Survei Baseline adalah rumah tangga dan siswa baik yang sudah atau belum menerima program MBG dan dilakukan secara panel. Pelaksanaan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei Baseline pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025. Rangkaian kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman, pengembangan moda pencacahan dan web monitoring melalui aplikasi FASIH dan pelatihan petugas), tahap pematangan dan pendataan lapangan,

tahap evaluasi (pelaksanaan supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan.

Isu Strategis Nasional

1. Perpres 12 2025 : Survei Kesejahteraan Petani

Survei Kesejahteraan Petani (SKP) merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS. Survei ini dilakukan untuk menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen pengukuran berbasis data yang mencerminkan kondisi kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Cakupan survei meliputi 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota dengan populasi responden RTUP pada enam subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei berbasis sampling dengan moda CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing), menggunakan metode wawancara oleh 3.022 Petugas Pendataan Lapangan dan Petugas Pemeriksaan Lapangan

2. UU 16 1997 : Sensus Ekonomi

3. Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah melalui beberapa tahapan penting. Pada tahap perencanaan, telah dilakukan pembahasan metodologi neraca arus energi dan emisi GRK berbasis System of Environmental Economic Accounts (SEEA) Central Framework.

Selain itu koordinasi dengan Direktorat Statistik Industri sebagai penanggung jawab kegiatan (PJK) terkait di BPS dan Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia untuk memastikan kesesuaian konsep serta ketersediaan data. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber kompilasi produk administratif.

4. Perpres 61 2024 dan Perpres 17 2025 : Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. Aktivitas ini berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan kebutuhan pasokan dan memastikan stabilitas pangan nasional.

Dalam mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan penanganan Isu Strategis Nasional Tahun 2025, Biro Keuangan sebagai unit kerja pendukung yang memastikan tersedianya dukungan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan yang terdiri dari Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Peran ini dapat menjadi fondasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas teknis BPS dalam menyediakan atau menghasilkan data statistik yang berkualitas, serta berkontribusi dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan tertib administrasi.

Secara khusus, Biro Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyelenggarakan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi untuk mendukung kegiatan statistik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Biro Keuangan memastikan ketersediaan dana untuk survei/sensus serta menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sebagai contoh Biro Keuangan berperan dalam kelancaran kegiatan pengelolaan anggaran terkait pelaksanaan Survei Makan Gizi Gratis antara lain terkait penyelesaian administrasi sampai dengan penyajian dalam laporan keuangan.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Rencana kerja Biro Keuangan BPS Tahun 2025 berfokus pada pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Prioritas utama mencakup peningkatan layanan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi dokumen, serta penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk mendukung kinerja statistik yang andal.

Sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA054.01-0/2025, Biro Keuangan menerima pagu anggaran sebesar Rp 388.575.364 pada awal tahun 2025. Anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan yang terbagi kedalam 5 Rincian Output (RO). BPS melakukan

revisi DIPA sehingga pagu anggaran yang dikelola Biro Keuangan menjadi Rp356.331.705.000 atau turun sekitar 15 milyar dari pagu awal.

Tabel 4. Alokasi Pagu Anggaran Biro Keuangan Tahun 2025
(dalam jutaan rupiah)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)		Pagu Awal		Pagu Akhir	
		Pagu Awal	% terhadap pagu total	Pagu Akhir	% terhadap pagu total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2884	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	388.575.364	100,00%	356.331.705	100,00%
EBA	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	371.750.015	95,67%	351.298.096	98,59%
EBD	Layanan Manajemen Keuangan				
051.0A	Layanan Administrasi Keuangan	11.536.543	2,97%	4.494.497	1,26%
051.0B	Dokumen Perbendaharaan Pelaksanaan	904.293	0,23%	118.739	0,03%
051.0C	Dokumen Perbendaharaan Evaluasi	241.713	0,06%	96.686	0,03%
051.0D	Laporan Keuangan	4.142.800	1,07%	323.687	0,09%

BAB

III

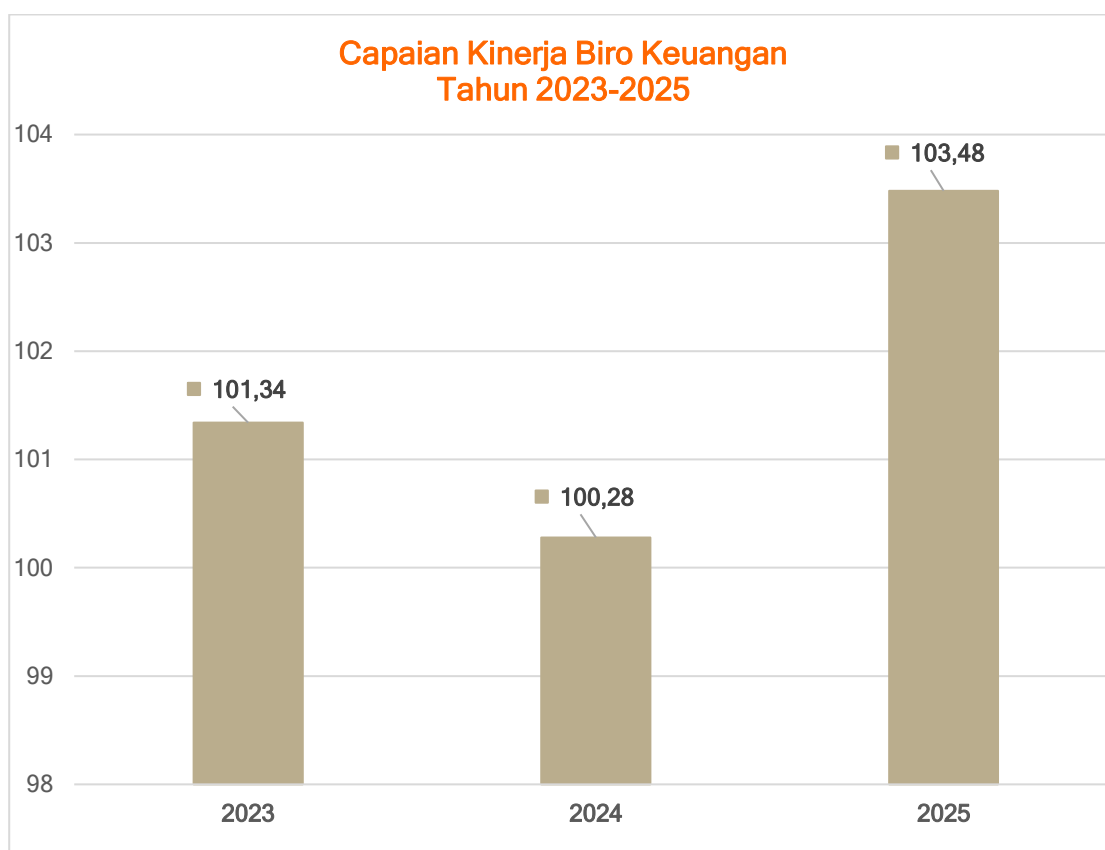
AKUNTABILITAS KINERJA

- Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Biro Keuangan Tahun 2025
- Capaian Kinerja Biro Keuangan Terhadap Target Renstra
- Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025
- Prestasi dan Inovasi Biro Keuangan
- Realisasi dan Efisiensi Anggaran

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Realisasi, Capaian Kinerja dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Biro Keuangan Tahun 2025

a. Perbandingan Capaian Kinerja Total Biro Keuangan selama Tahun 2023-2025.



Gambar 6. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023-2025

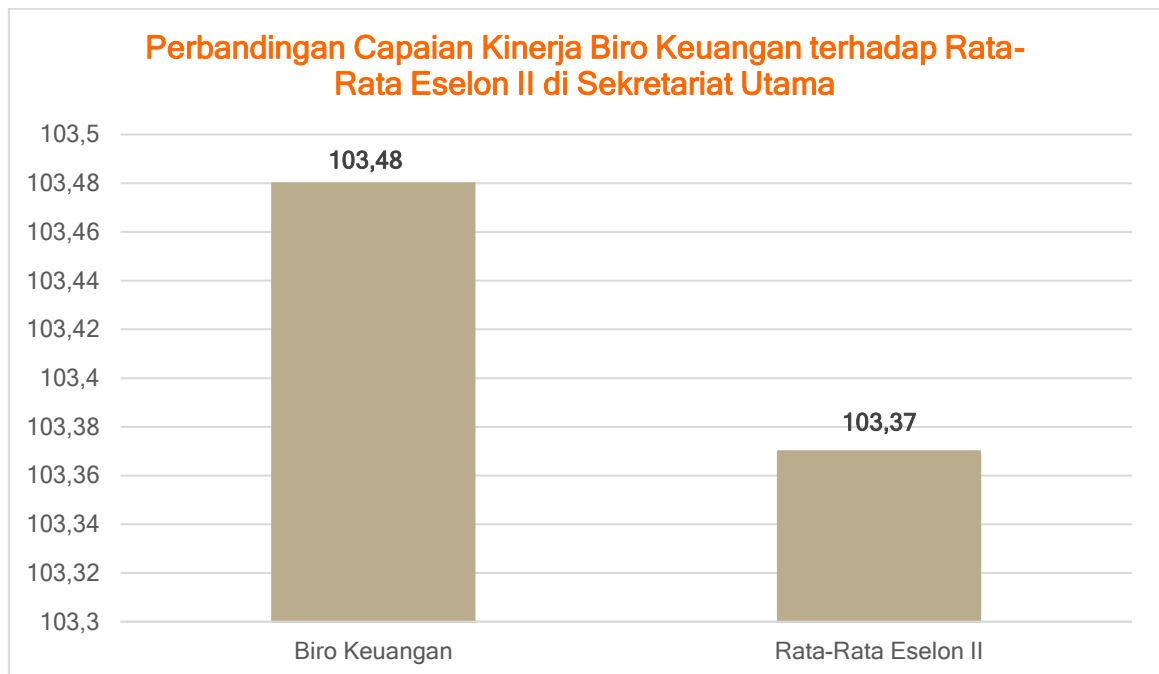
Capaian kinerja Biro Biro Keuangan pada tahun 2025 mencapai 103,48 persen. Capaian kinerja pada tahun 2025 merupakan capaian kerja tertinggi diantara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Selama tiga tahun terakhir capaian kinerja Biro Keuangan memiliki capaian yang lebih dari 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa

realisasi Biro Keuangan pada tiga tahun terakhir sudah melampaui target yang ditetapkan.

b. Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Biro Keuangan Tahun 2025

Nilai PKO 2025 Biro Keuangan adalah 91,57. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 nilai ini mendapat predikat “Baik” dengan interpretasi bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

c. *Benchmarking* Capaian Kinerja Biro Keuangan terhadap Rata-Rata Eselon II.



Gambar 7. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Keuangan terhadap Rata-Rata Eselon II di Sekretariat Utama

Berdasarkan gambar di atas, Biro Keuangan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Utama. Dari hasil tersebut Biro Keuangan telah melakukan upaya untuk menyelesaikan kendala terkait pengelolaan keuangan sehingga diperoleh nilai IKPA yang dicapai

melampaui target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Biro Keuangan juga terus melakukan upaya rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat terselesaikan dengan tepat waktu serta tetap menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- d. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Biro Keuangan per Sasaran selama Tahun 2023-2025

Tabel 5. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Biro Keuangan per Sasaran selama Tahun 2023-2025

Sasaran		Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan									
Sasaran: Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran										
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)	94,50	94,50	94,42	95,97	97,79	N/A (Belum dijadikan indikator)	103,48	
Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100,00	100,00	N/A (Belum dijadikan indikator)	100,00	100,00	N/A (Belum dijadikan indikator)	100,00	

e. Analisis Capaian Kinerja 2025 per Indikator Kinerja

Akuntabilitas kinerja Biro Keuangan merupakan perwujudan kewajiban Biro Keuangan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Biro Keuangan 2025 dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja selama tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025.

Pada tahun 2025, rata-rata capaian kinerja Biro Keuangan terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 103,48 persen. Nilai ini merupakan nilai capaian dari 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang diampu oleh Biro Keuangan. Indikator tersebut masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. Rata-Rata Capaian Kinerja 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran			
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,50	97,79	103,48
Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100,00	100,00	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja			103,48

I. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja dari suatu Kementerian/Lembaga. IKPA mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Tabel 7. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran			
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,50	97,79	103,48
Indikator Proksi:			
Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	94,00	99,25	105,59
Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	99,00	99,81	100,82

Berdasarkan tabel diatas, Nilai IKPA yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar 97,79. Nilai ini memperoleh capaian sebesar 103,48 persen dari target yang ditetapkan di awal yaitu nilai 94,50.

Pengukuran nilai IKPA Biro Keuangan menggunakan 2 (dua) indikator proksi yaitu nilai kualitas pelaksanaan anggaran dan nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Untuk indikator proksi nilai kualitas pelaksanaan

anggaran, Biro Keuangan memperoleh nilai 99,25 dimana nilai ini sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu 94,00 atau dengan capaian 105,59 persen. Untuk indikator proksi nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran Biro Keuangan memperoleh nilai 99,81 dimana nilai ini sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu 99,00 atau dengan capaian 100,82 persen.

Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai nilai IKPA tersebut Biro Keuangan mengalami beberapa kendala, antara lain:

1. Keterlambatan penyampaikan berkas tagihan lembur Tahun 2024
2. Pemahaman konsep, definisi, dan aturan yang tidak sama terkait perpajakan
3. Masih terdapat dokumen pembayaran yang belum layak untuk dibayar seperti kurangnya dokumen, kesalahan perhitungan, dan kekurangan tanda tangan
4. Masih terdapat belanja yang terbayarkan dua kali atau kurang bayar dan terdapat perekaman belanja yang belum sesuai sehingga mengakibatkan pembetulan LPJ pada bulan berikutnya
5. Masih terdapat permintaan TUP yang nilainya lebih besar dari realisasi pertanggungjawaban TUP
6. Pembayaran uang makan PPPK bulan September 2025 belum dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran (pagu minus)
7. Pembayaran uang tunjangan kinerja untuk beberapa kelas jabatan PPPK belum dapat dibayarkan karena belum ada Perban BPS untuk kelas jabatan tersebut

8. Adanya peningkatan kegiatan yang tinggi di Triwulan IV akibat dari dibukanya pagu anggaran yang diblokir

Untuk mengatasi kendala yang ada, Biro Keuangan menanganinya dengan solusi seperti:

1. Menyusun surat Kepala Biro Keuangan terkait kebijakan pembayaran lembur
2. *Benchmarking* ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan terkait tata laksana pembayaran lembur pegawai
3. Melakukan revisi halaman 4 DIPA terkait pembayaran lembur Tahun 2024
4. Menyamakan persepsi melalui zoom dengan inspektorat dan konsultasi ke DJP terkait aturan yang berlaku
5. Menerbitkan kertas kerja permasalahan, Koordinasi dengan PPK dan BPP Penyetoran kembali atas belanja yang *double* bayar atau pembuatan kekurangan atas spj yang belum terbayarkan dan perbaikan transaksi belanja pada aplikasi SAKTI
6. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Subject Matter dan PPK terkait realisasi pertanggung jawaban TUP agar permintaan TUP sesuai dengan realisasinya
7. Menambah pagu anggaran untuk uang makan PPPK
8. Menunggu terbitnya Perban BPS terbaru tentang kelas jabatan PPPK
9. Memperkuat tim pengelola keuangan dan menambah jam kerja

Rencana tindak lanjut lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2026 diantaranya adalah berkoordinasi dengan para pihak untuk segera menyelesaikan perbaikan; berkomunikasi dengan PPK untuk berkoordinasi dengan PJK dan BPP setiap kali akan melakukan pengajuan TUP; dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan, PJK, dan pengelola anggaran terkait pelaksanaan anggaran.

II. Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa setiap Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara pada BPS.

Biro Keuangan sebagai unit kerja yang mengelola keuangan BPS melaksanakan proses akuntansi dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan untuk tingkat Kementerian/Lembaga. Laporan keuangan tingkat Kementerian/Lembaga BPS merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan yang disusun secara berjenjang dari tingkat satuan kerja yaitu BPS Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat sampai tingkat wilayah yaitu BPS Provinsi. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi

pemerintahan. Pada setiap akhir periode pelaporan keuangan, laporan keuangan tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil dari pemeriksaan laporan keuangan tersebut berupa opini. Opini yang ditargetkan untuk dicapai pada setiap akhir pelaksanaan APBN adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Tabel 8. Capaian Kinerja Persentase Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran			
Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100,00	100,00	100,00

Indikator ini memperoleh capaian sebesar 100,00 persen pada tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebesar 100,00 persen dan dengan realisasi yang sebesar 100,00 persen. Dalam pencapaian ini tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih terdapat data rekonsiliasi SAI dan SiAP yang belum sesuai pada belanja pegawai dan belanja barang yang disebabkan oleh data koreksi yang dibukukan masih berbeda antara satker dengan KPPN
2. Debitur belum ada itikad untuk menyelesaikan TGR

3. Debitur belum bersedia menandatangani SKTJM, sehingga proses penyelesaian TGR belum dapat dilanjutkan
4. Masih terdapat transaksi resiprokal antara BPS dan BGN
5. Terdapat tagihan 2025 pada kegiatan Sensus Ekonomi yang tidak terbayar sehingga menjadi tunggakan di tahun 2026.

Untuk menyelesaikan kendala yang ada, Biro Keuangan melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Melakukan perbaikan data pada tingkat satker
2. Terus melakukan upaya komunikasi dengan debitur via Whatsapp, telepon, email, dan sosmed
3. Berkoordinasi dengan BGN terkait penyelesaian transaksi resiprokal
4. Mencatat tunggakan pada Laporan Keuangan satker dan mengusulkannya pada Halaman IV DIPA

Rencana tindak lanjut lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2026 diantaranya adalah melakukan rekonsiliasi ulang pada pelaporan keuangan Periode 12 Tahun 2025; Kepala Biro Keuangan BPS akan berkoordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BGN untuk penyelesaian permasalahan transaksi resiprokal; dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait usulan tunggakan pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, Biro Keuangan juga berencana untuk mengadakan workshop penyusunan laporan Keuangan dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait penyusunan laporan Keuangan.

3.2. Capaian Kinerja Biro Keuangan Terhadap Target Renstra

Pada Tahun 2025, realisasi Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,79 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 94,50 dengan capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 103,48 persen. Capaian ini tentunya diperoleh dengan dukungan dari seluruh tim kerja yang terkait dalam pengelolaan keuangan yang ada di Biro Keuangan. Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara penanggung jawab kegiatan dengan pengelola keuangan juga membantu dalam pencapaian nilai tersebut.

Realisasi indikator Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah pada tahun 2025 adalah sebesar 100,00 persen dengan capaian sebesar 100,00 persen. Dalam pencapaian target, pelaksanaan penyusunan laporan keuangan didukung oleh adanya digitalisasi berupa aplikasi yang mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan yaitu *E-Calk*. Koordinasi yang baik antar operator penyusun laporan keuangan pada setiap jenjangnya juga mendorong terbentuknya kerjasama yang memengaruhi proses pencapaian target. Namun dalam pelaksanaannya terdapat juga tantangan yang memengaruhi proses pencapaian target yaitu kurangnya apresiasi dan dukungan dari manajemen, kurang meratanya pemahaman teknis dalam penyusunan laporan keuangan, dan adanya perubahan dinamika dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 9. Capaian Kinerja Biro Keuangan terhadap Target Renstra

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Sasaran: Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran							
1.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Poin	94,50	96,50	97,79	103,48	101,34
2.	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis

Nasional Tahun 2025

a. Output yang Dihasilkan

Biro Keuangan mendukung kegiatan Makan Bergizi Gratis dengan memberikan dukungan secara administrasi berupa penyelesaian pertanggungjawaban keuangan. Output yang dihasilkan berupa Monitoring Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Monitoring Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis

Uraian	Pagu	Realiasi	Persentase	Sisa
Survei Monitoring Dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis	17.431.273.000	13.478.734.136	77,33	3.952.538.864

b. Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Kendala yang terjadi adalah masih terdapat permintaan TUP yang nilainya lebih besar dari realisasi pertanggungjawaban TUP. Adanya kendala tersebut telah diselesaikan dengan solusi antara lain dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PJK dan PPK terkait realisasi pertanggungjawaban TUP, agar permintaan TUP sesuai dengan realisasinya; menyetorkan sisa TUP; dan memperkuat tim pengelola keuangan dan menambah jam kerja.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dilakukan oleh Biro Keuangan diantaranya adalah:

- Berkoordinasi dengan para pihak untuk segera menyelesaikan perbaikan
- Komunikasi dengan PPK untuk berkoordinasi dengan PJK dan BPP setiap kali akan melakukan pengajuan TUP
- Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan, PJK, dan pengelola anggaran terkait pelaksanaan anggaran

3.4. Prestasi dan Inovasi Biro Keuangan

3.4.1 Prestasi

1. Opini LK WTP

Pada tahun 2025, Badan Pusat Statistik mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024.

2. Penghargaan Biro Keuangan sebagai Unit Pengolah dengan Hasil Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 Terbaik I

Atas pencapaiannya dalam Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerjanya dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 sebesar 99,265 dengan Kategori AA Sangat Memuaskan.

3. Penghargaan Angger Wiji Rahayu sebagai *Change Champion 2025* Kategori Unit Kerja Pusat terbaik III


3.4.2 Inovasi

1. Aplikasi E-PIPK

E-PIPK adalah aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi penerapan dan penilaian PIPK di lingkup Badan Pusat Statistik. Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.

2. SIMOKA

Sistem Monitoring Administrasi Keuangan Pusat (SIMOKA) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh tim tata usaha biro keuangan. Aplikasi ini digunakan



untuk memonitoring dan memudahkan proses yang terkait pembayaran gaji pegawai.

3. *Benchmarking*

Benchmarking adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh tim reformasi birokrasi biro keuangan sebagai media komunikasi dengan stakeholder di luar lingkungan BPS. Kegiatan berupa kunjungan ke beberapa kementerian/lembaga.

4. Update Pelaksanaan EOTM

EOTM pada tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang memasukkan komponen berakhlak pada penilaian EOTM. Penilaian dilakukan menggunakan WA-Blast yang dikirim ke seluruh pegawai di Biro Keuangan.

3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Untuk mendukung sasaran strategis “Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran” , Biro Keuangan mengampu 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan indikator Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Tahun 2025, indikator kinerja nilai IKPA mencapai realisasi kinerja sebesar 97,79 poin dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 94,50 poin atau 103,48 poin capaian kinerja terhadap target 2025. Untuk indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah mencapai realisasi kinerja sebesar 100,00 poin dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100,00 poin atau 100,00 poin capaian kinerja terhadap target 2025.

Biro Keuangan menerima pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp356.331.705.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp282.013.778.690 atau 79,14 persen. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program dan kegiatan indikator kinerja Nilai IKPA sebesar Rp356.008.018.000 dengan realisasi belanja Rp 281.746.978.916 atau 79,07 persen dengan tingkat efisiensi 1,31 persen. Anggaran untuk mendukung program dan kegiatan indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan BPS yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar Rp323.687.000 dengan realisasi belanja Rp 266.799.774 atau 82,43 persen dengan tingkat efisiensi 1,21 persen. Total efisiensi yang dilakukan Biro Keuangan sepanjang tahun 2025 adalah 1,26 persen. Pada tahun anggaran 2025, Biro Keuangan menerima pagu anggaran sebesar Rp356.331.705.000 dengan realisasi sebesar Rp282.013.778.690 atau

79,14 persen. Anggaran Biro Keuangan tahun 2025 terdiri dari gaji dan tunjangan, layanan administrasi keuangan, dokumen perbendaharaan pelaksanaan, dokumen perbendaharaan evaluasi dan laporan keuangan.

Tabel 11. Target, Realisasi Target, Capaian Terhadap Target, Pagu dan Realisasi Anggaran, Efisiensi Biro Keuangan menurut Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Pagu Yang Dapat Digunakan	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran 2025	Efisiensi (%)
				Terhadap Target 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran								
Nilai IKPA	Poin	94,50	97,79	103,48	356.008.018.000	281.746.978.916	79,07	1,31
Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	323.687.000	266.799.774	82,43	1,21
Total					356.331.705.000	282.013.778.690	79,14	1,26

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan efisiensi penganggaran. Artinya setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Perbandingan persentase antara capaian kinerja dengan realisasi penyerapan

anggaran Biro Keuangan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah, terlihat bahwa Biro Keuangan mampu melakukan efisiensi pada seluruh sasaran strategis.

Tabel 12. Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Sasaran Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Pagu TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
SS.1.Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	356.331.705.000	282.013.778.690	79,14

Upaya-upaya efisiensi yang dilakukan Biro Keuangan diantaranya adalah penghematan anggaran perjalanan dinas dengan pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi dengan Biro Perencanaan selama tahun 2025, pelaksanaan kegiatan workshop secara *online*, optimalisasi penggunaan kendaraan dinas, dan penghematan kertas dan toner untuk pencetakan laporan keuangan yang saat ini dilakukan pengiriman melalui e-mail.

BAB

IV

PENUTUP

- Kesimpulan
- Rekomendasi dan Perbaikan Kinerja

BAB IV - PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan BPS tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 103,48 persen. Capaian kinerja pada tahun 2025 merupakan capaian kerja tertinggi diantara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Selama tiga tahun terakhir capaian kinerja Biro Keuangan memiliki capaian yang lebih dari 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa realisasi Biro Keuangan pada tiga tahun terakhir sudah melampaui target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025, realisasi Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,79 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 94,50 dengan capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 103,48 persen. Realisasi indikator Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah pada tahun 2025 adalah sebesar 100,00 persen dengan capaian sebesar 100,00 persen.

Biro Keuangan mendukung kegiatan Makan Bergizi Gratis dengan memberikan dukungan secara administrasi berupa penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, dengan realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis adalah sebesar 77,33 persen.

Upaya-upaya untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja perlu terus dilakukan oleh Biro Keuangan. Untuk tahun 2025, penyerapan anggaran Biro Keuangan pada Program Dukungan Manajemen

(Dukman) mencapai 79,14 persen. Biro Keuangan terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik.

4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Dari capaian kinerja yang sudah diraih Biro Keuangan BPS pada tahun 2025, tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk kedepannya yaitu lebih meningkatkan pelayanan di bidang keuangan sehingga bisa lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil evaluasi dari beberapa aspek yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya maka terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja Biro Keuangan BPS pada tahun 2025. Beberapa hal tersebut dituangkan dalam kegiatan sehingga aspek pencapaiannya dalam pemenuhan di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan, antara lain:

1. Seluruh tim pada biro Keuangan akan terus bekerja sama untuk memberikan solusi atas kendala yang terjadi pada setiap sasaran kinerja agar nilai target kinerja dapat tercapai dan kendala yang terjadi dapat dimitigasi dengan baik dan tepat waktu. Tindak lanjut yang dilakukan pada setiap indikator sasaran antara lain:

Indikator Utama	Tindak Lanjut
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ol style="list-style-type: none">a. Berkoordinasi dengan para pihak untuk segera menyelesaikan perbaikanb. Komunikasi dengan PPK untuk berkoordinasi dengan PJK dan BPP setiap kali akan melakukan pengajuan TUP

	c. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan, PJK, dan pengelola anggaran terkait pelaksanaan anggaran.
Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	<p>a. Melakukan rekonsiliasi ulang pada pelaporan keuangan Periode 12 Tahun 2025</p> <p>b. Kepala Biro Keuangan BPS berkoordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BGN untuk menyelesaikan transaksi resiprokal</p> <p>c. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait usulan tunggakan pada tahun anggaran berikutnya</p>

2. Biro Keuangan akan melakukan pembaharuan secara berkala terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Pusat Statistik dalam menjawab perubahan aturan dan kebijakan dalam bidang keuangan.
3. Perlu dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan pelaksanaan kegiatan. Sebisa mungkin pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun sebelumnya. Penyusunan Rencana Aksi yang sudah dilakukan perlu dilanjutkan, namun harus ada kerja sama dan koordinasi dari semua unit di Biro Keuangan, sehingga tidak ada sasaran kegiatan yang tumpang tindih atau bentrok jadwal pelaksanaannya. Adapun rencana kerja yang sudah disusun ini harus siap untuk disesuaikan setiap saat, bilamana memang muncul perubahan prioritas pekerjaan.
4. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan di internal Biro Keuangan untuk segera bisa mengidentifikasi kendala yang

dihadapi dan menyusun rencana tindak yang tepat. Jika memang ada perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan, maka penjadwalan ulang semua kegiatan harus dilakukan dengan segera, sehingga semua target capaian kinerja bisa dipenuhi.

5. Koordinasi yang berkesinambungan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
6. Kegiatan yang telah berjalan dengan baik harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan prestasinya untuk tahun-tahun yang akan datang.
7. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait perlunya pembinaan terhadap seluruh satker di lingkup Badan Pusat Statistik tentang pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan adanya pembinaan baik secara offline maupun online dengan koordinator satker di provinsi, kabupaten dan kota.
8. Tindak lanjut atas penilaian SAKIP Biro Keuangan 2024 telah dilaksanakan dan diperbaiki pada tahun 2025.

Pada akhirnya, diharapkan LAKIN Biro Keuangan ini akan memberikan gambaran riil atas pencapaian kinerja Biro Keuangan dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2025. Semoga hasil evaluasi yang dituangkan dalam LAKIN ini dapat berguna sebagai umpan balik dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Biro Keuangan untuk tahun-tahun yang akan datang.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darusman, S.Si, MM.
Jabatan : Kepala Biro Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P
NIP. 19690215199112 1 001

Jakarta, 03 Maret 2025
Pihak Pertama

Darusman, S.Si, MM.
NIP. 19720727199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO KEUANGAN

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,50 Poin
2.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100,00 Persen

Program/Kegiatan	Anggaran
1) 2884 Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	Rp. 388.575.364.000
Jumlah	Rp. 388.575.364.000

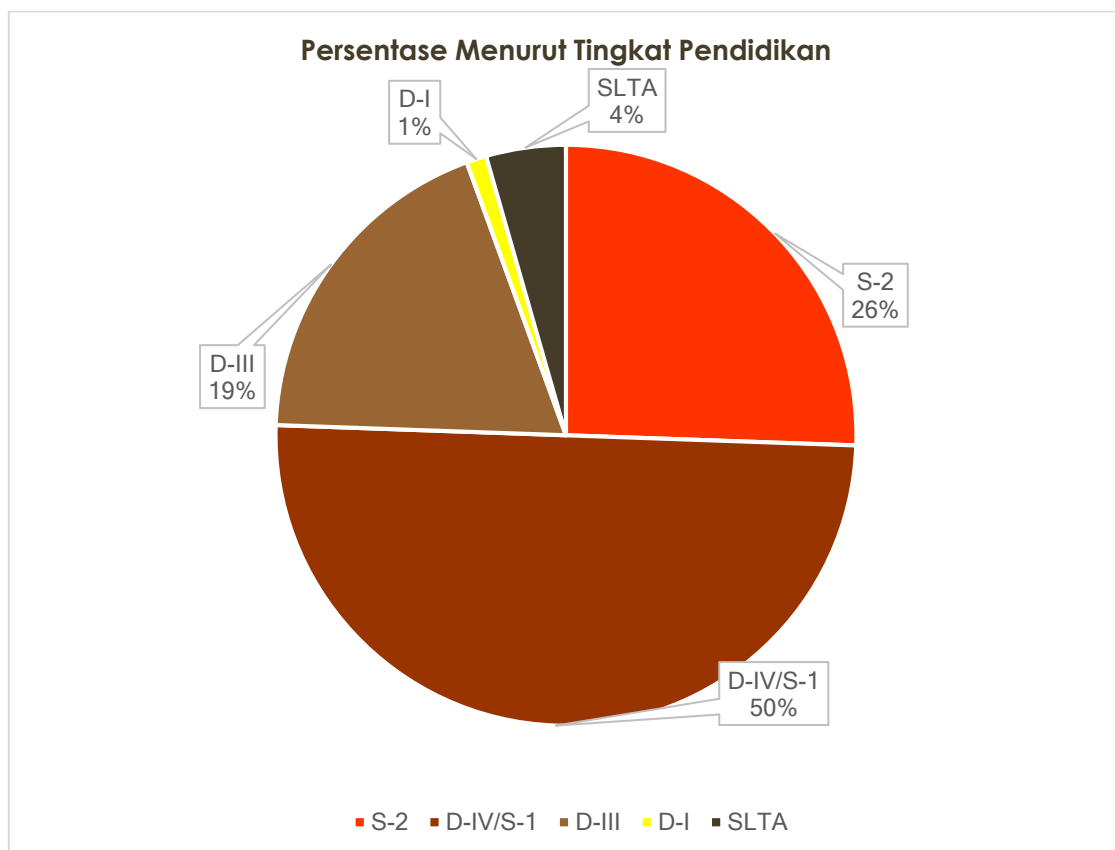
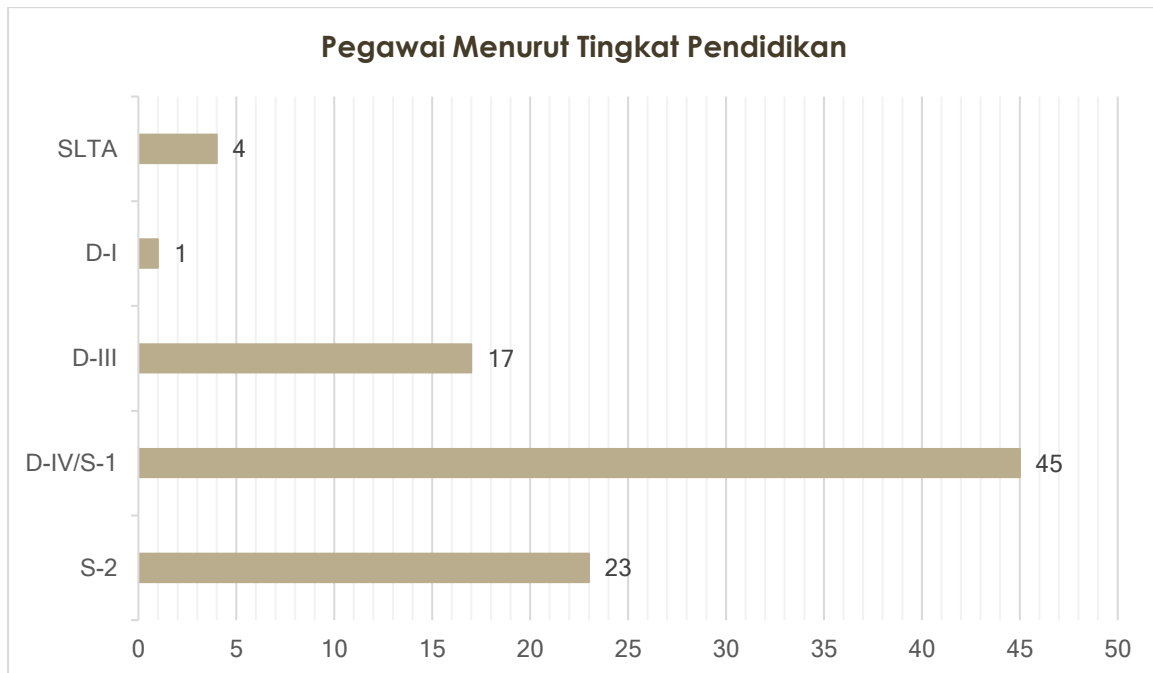
Pb. Sekretaris Utama


Moh Eddy Mahmud, S.Si, M.P
NIP. 196902 | 5199112 | 001

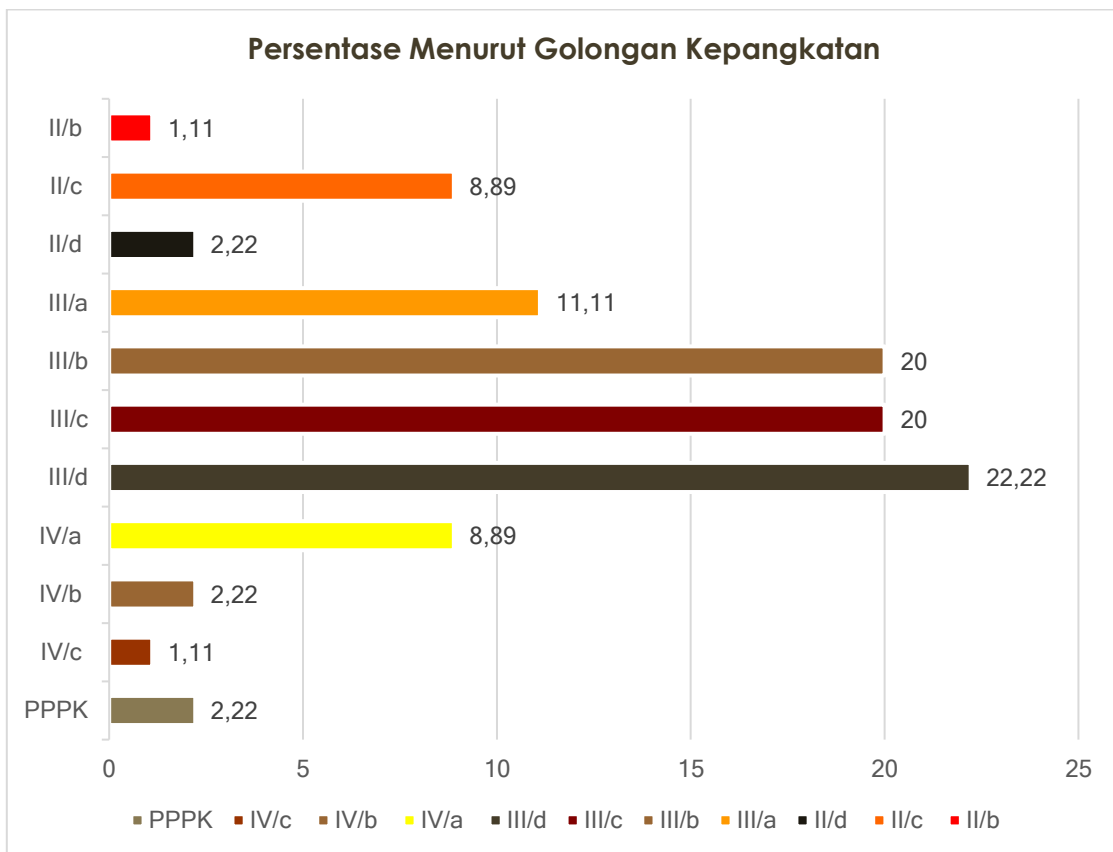
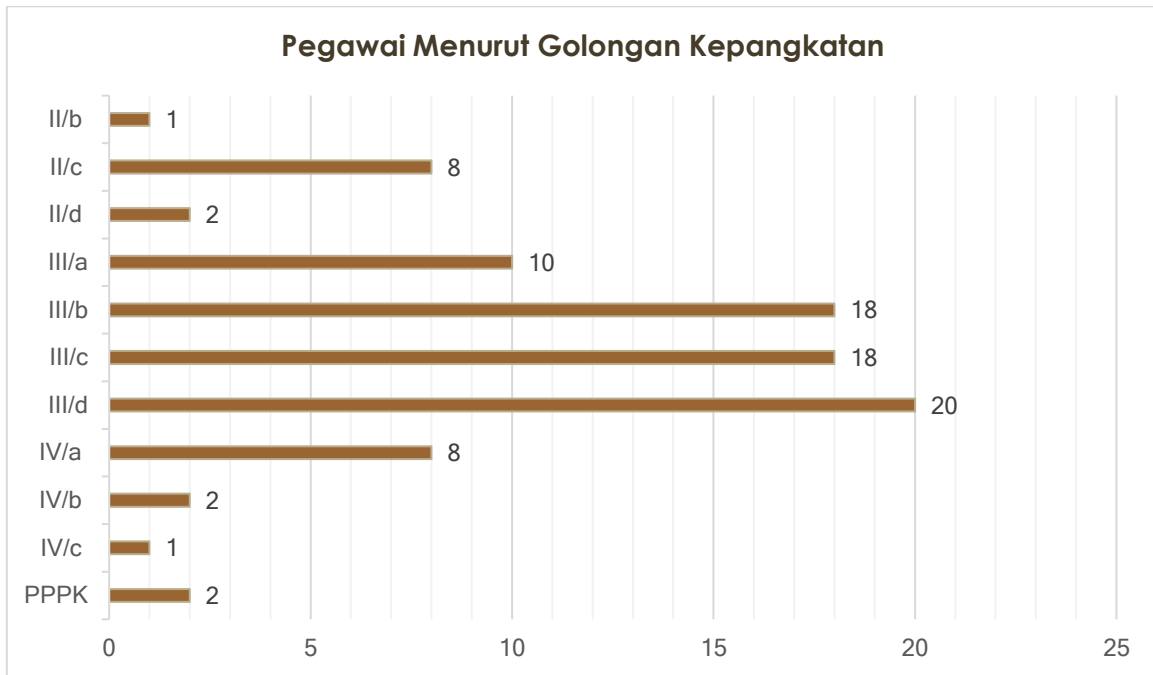
Jakarta, 03 Maret 2025
Kepala Biro Keuangan


Daruwan, S.Si, MM,
NIP. 19720727199412 | 001

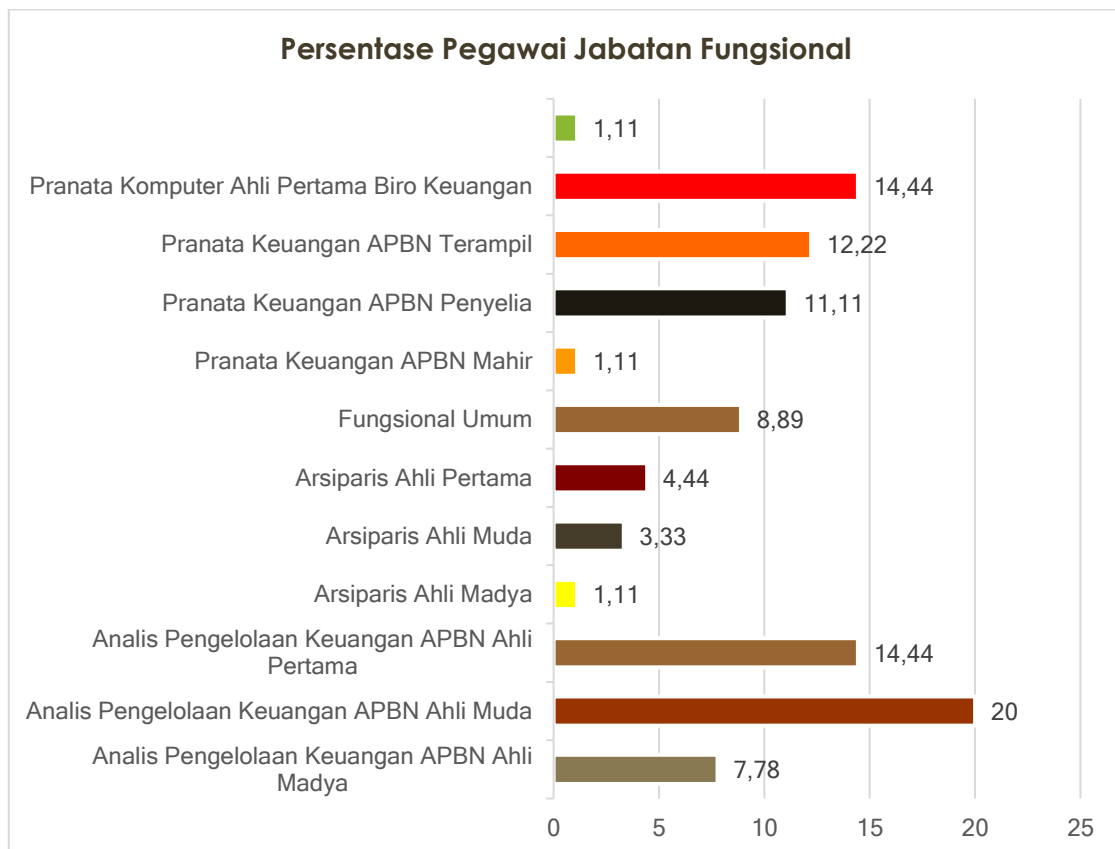
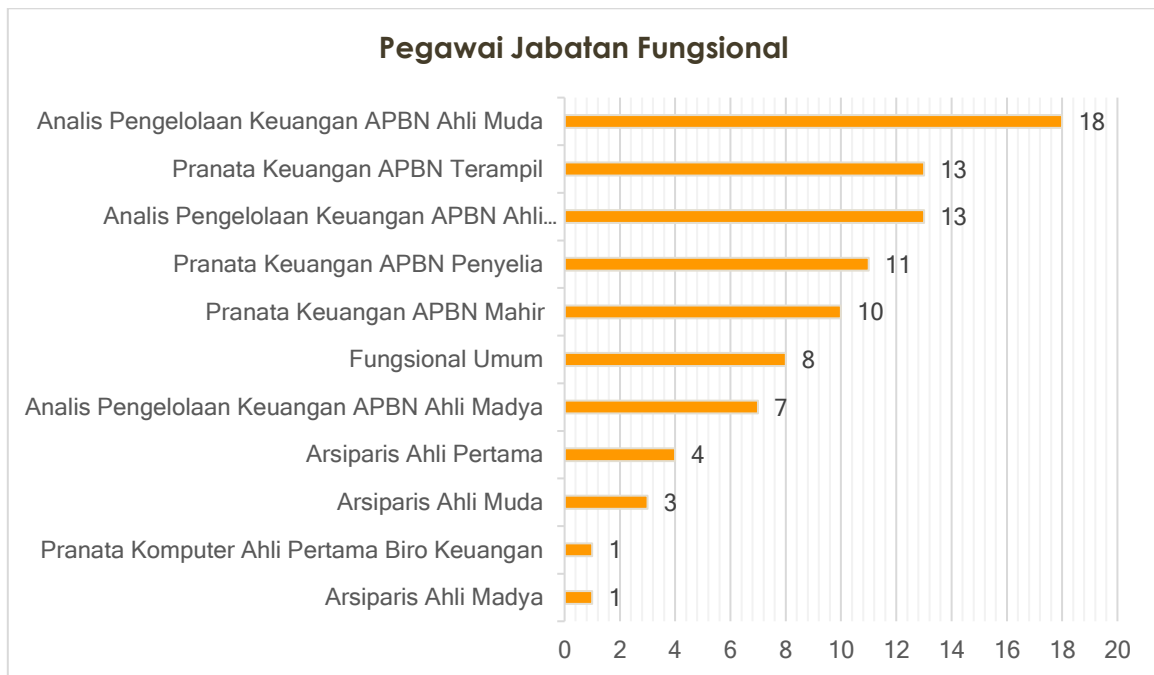
LAMPIRAN 2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025



LAMPIRAN 3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025



LAMPIRAN 4 Jumlah Pejabat Fungsional Biro Keuangan Tahun 2025



LAMPIRAN 5 Daftar Prestasi/Penghargaan Biro Keuangan Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025

Opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024

Lampiran

Perincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ²⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional ²⁾	WTP	WDP	"	"	"
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BPK

LHP LK - LKPP Tahun 2024

8

ya

Unit Pengolah dengan Hasil Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 Terbaik I



Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerjanya dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 sebesar 99,265 dengan Kategori AA Sangat Memuaskan

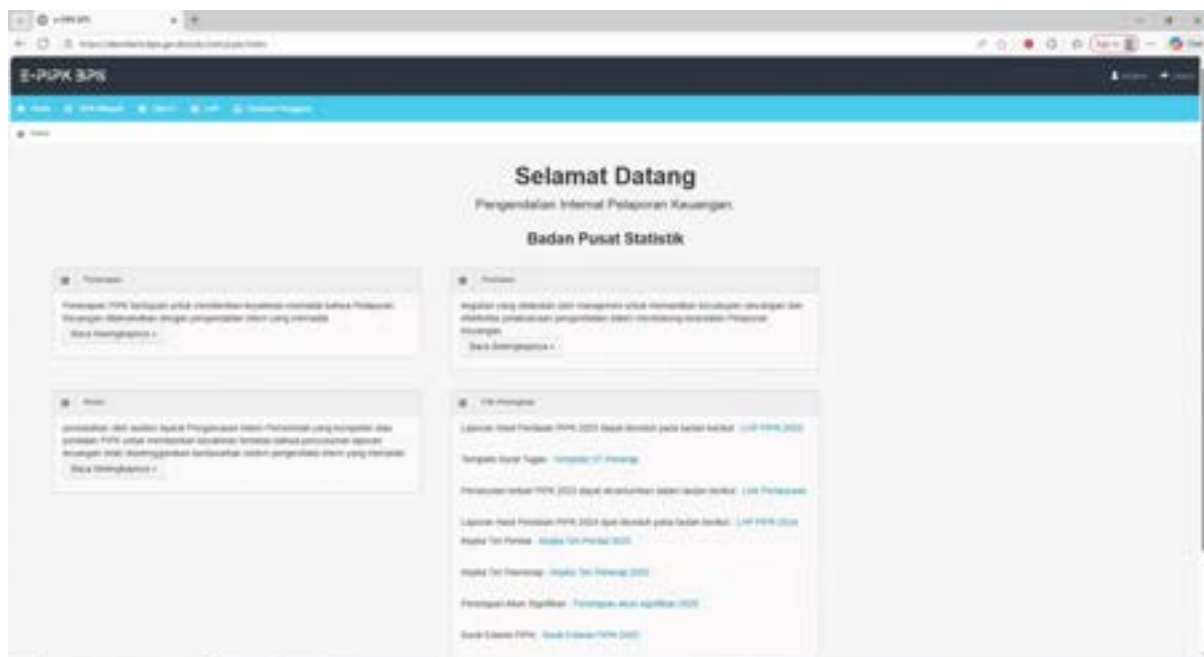


**Change Champion 2025 Kategori Unit Kerja Pusat Terbaik III atas nama
Angger Wiji Rahayu**



LAMPIRAN 6 Daftar Inovasi Unit Kerja Menurut Biro Keuangan Tahun 2025

Aplikasi E-PIPK



SIMOKA



Benchmarking



Employee of The Month

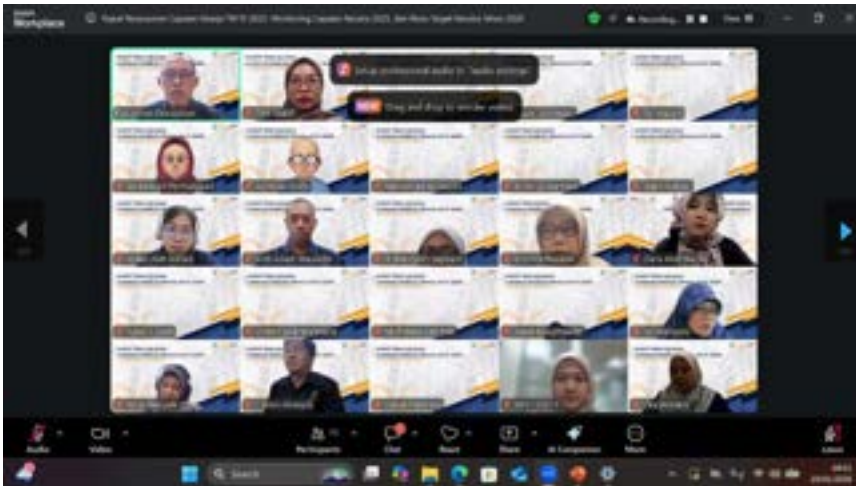




LAMPIRAN 7 Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Unit Kerja TA 2025

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Capaian		Pagu Yang Dapat Digunakan	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran 2025	Efisiensi (%)
			Realisasi 2025	Terhadap Target 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran								
Nilai IKPA	Poin	94,50	97,79	103,48	356.008.018.000	281.746.978.916	79,07	1,31
Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	323.687.000	266.799.774	82,43	1,21
Total					356.331.705.000	282.013.778.690	79,14	1,26

LAMPIRAN 8 Dokumentasi Kegiatan



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046,
Homepage: <https://bps.go.id/> Mailbox: bpshq@bps.go.id